

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN INDONESIA

Hubungan negara Indonesia dengan Republik Rakyat China sudah terjadi pada zaman dahulu dan Apa bila di telusuri hubungan kedua negara tersebut sudah terjadi ribuan tahun yang lalu atau sekitar 2000 tahun yang lalu, dimana hubungan ini terjadi pada masa nenek moyang Indonesia dengan nenek moyang Republik Rakyat China. Keeratan hubungan kedua negara diketahui melalui kedatangan etnis yang berasal dari negara China menuju ke Indonesia, untuk pertamakalinya yang telah dapat dibuktikan pula dengan adanya peninggalan-peninggalan benda-benda kuno dan bersejarah dari kerajaan-kerajaan kuno Indonesia dimasa lampau dimana telah memiliki kaitan yang erat dengan etnis China, seperti kerajaan Sriwijaya, Airlangga, dan pada kerajaan Majapahit.

Sebagai suatu simbolik hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China ketika pada saat masa nenek moyang, dimana pada saat itu muhibah Cheng Huo menemukan momentum simbolik kedalam kisah perjalanannya yang masyur pada abad ke 14. Bukti interaksi antara Indonesia dengan Republik Rakyat China berupa budaya itu ada, yaitu Bedug yang hanya di gunakan di mesjid-mesjid ataupun mushollah yang ada di Indonesia (repository.usu.ac.id, 2011).

Pada era modern seperti sekarang, hubungan anantara Indonesia dengan Republik Rakyat China mencapai fase kedekatannya dimana terjadi pada pasca kemerdekaan Indonesia. Begitu pula pada periode awal hubungan bilateral Indonesia dengan Republik Rakyat China yang terjadi pada rentang waktu 1950 hingga 1967.

Secara resmi, hubungan negara Indonesia dengan Republik Rakyat China terjadi pada tahun 1950. Dimana pada saat itu Indonesia telah mengakui berdirinya China yang baru, yaitu sebagai negara yang menganut sistim komunis dan Negara Indonesia tercatat

sebagai negara yang pertama dalam mengakui pemerintahan China yang bersifat komunis (repository.usu.ac.id, 2011).

Pada tahun 1953, Indonesia telah mengirimkan utusan Duta besar untuk Republik Rakyat China yang bernama Arnold Mononutu. Pengiriman Duta besar Indonesia untuk Republik Rakyat China pertama kali sebagai tanda awal eratnya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China (repository.usu.ac.id, 2011). Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China telah terjadi sekitar 65 tahun yang lalu yang secara resmi dalam menjalin hubungan Diplomatik. Hubungan yang dijalin oleh Indonesia dengan Republik Rakyat China pada saat itu merupakan komitmen yang nyata dimana kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dalam keadaan perang dingin pada saat itu.

A. Pada era Presiden Ir. Soekarno (1945-1966)

Pada masa era Presiden Soekarno yang menjadi tonggak serta pondasi awal hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China. Liu Hong, dalam *China and the Shaping of Indonesia 1949-1965*, mengungkap pada masa itu Republik Rakyat China bagaikan mercusuar yaitu sebagai penunjuk arah kemana Indonesia akan dibangun.

Model pembangunan dilakukan ala Republik Rakyat China diperbincangkan oleh para cendekiawan-cendekiawan Indonesia. Serta Kisah-kisah mengenai China dimuat dalam surat-surat kabar, dan bahkan karya-karya sastra, sehingga menyentuh luas di masyarakat. Namun, tak bisa dipungkiri lagi pada masa itu disebut sebagai masa “Bulan madunya Indonesia dengan China” karena hubungan kedua negara tersebut secara hubungan Diplomatik masih dikatakan baru. Hubungan kedua negara dan pertukaran yang terjadi bukan hanya terjadi di kalangan kelas atas melainkan juga terjadi pada kalangan-kalangan bawah (Sitanggang, 2015).

Pada April 1950, Indonesia pertama kali membuka gerbang diplomatik dengan Cina. Kerja sama antara kedua negara mencapai puncaknya saat Konferensi Asia Afrika (Liputan6, 2005). Hubungan diplomatik Indonesia dengan Republik Rakyat China tersebut mulai menunjukkan perkembangan yang terbilang positif yaitu di tunjukan dengan kehadiran perdana Republik Rakayat China yaitu Zhou En Lai beserta delegasi pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-25 April 1955 (Indonesia CRI, 2009).

Dimana konferensi Asia-Afrika ini dilakukan di Indonesia yaitu lebih tepatnya dilakukan di kota Bandung, Jawa barat. Dalam konferensi Asia Afrika “Lima prinsip hidup berdampingan secara damai” yang dikemukakan pemerintah Republik Rakyat China dan disponsori bersama dengan pemerintah India dan pemerintah Myanmar mendapat dukungan dari seluruh peserta. kehadiran perdana Republik Rakayat China yaitu Zhou En Lai secara resmi datang ke Indonesia pasca Konferensi Asia Afrika (Indonesia CRI, 2009).

Indonesia dengan Republik Rakyat China pun sepakat akan mempererat hubungan mereka yang telah terjalin baik pada saat itu dan ditandai dengan penandatanganan perjanjian persahabatan dan persetujuan kerja sama di bidang kebudayaan pada 1 April 1961 (Indonesia CRI, 2009). Dalam konteks hubungan luar negeri yang lebih luas lagi Indonesia menganggap Republik Rakyat China amat penting apalagi pada tahun 1965 Indonesia keluar dari negara anggota PBB dan begitu juga bagi Republik Rakyat China menganggap Indonesia penting bagi mereka terlebih lagi Republik Rakyat China tidak termasuk kedalam anggota PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Pada era Presiden Jend. Soeharto (1966-1998)

Berakhirnya masa pemerintahan Presiden Ir. Soekarno ditandai dengan adanya Supersemar yang kita tau yaitu Surat Perintah Sebelas Maret yang membawa seorang

Jendral dari dunia militer Indonesia yaitu bapak Jenderal Soeharto yang menaiki kursi pemerintahan. Terjadinya pergantian kepemimpinan yang baru ini memberikan dinamika baru pada struktur dan sistem politik di Negara Indonesia, dan didalam proses pengambilan suatu keputusan. Sebagai seorang pemimpin yang baru pada masa orde baru, Jendral Soeharto menghadirkan perubahan dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Pada awal masa pemerintahannya, Jendral Soeharto cenderung bersikap pasif terhadap politik luar negeri Republik Indonesia dan bapak Jendral Soeharto juga memiliki dewan penasihat yang mendampinginya dalam mengambil sebuah keputusan.

Setelah Indonesia berada didalam kekuasaan militer dan pada saat itu pula pemerintahan yang disebut Orde baru dimulai yang dipimpin oleh bapak Jend. Soeharto dan melalui memorandum (berupa surat) yang berasal dari Departemen Luar Negeri yang di kirim langsung ke China, memorandum tersebut berisi dengan resmi negara Indonesia menegaskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China dan terhitung sejak 30 oktober 1967 dan setelah terjadinya pemberontakan “Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI)” pada 30 september 1965 (Indonesia.com, 2011).

Presiden kedua Republik Indonesia Jendral Soeharto telah memulai pemerintahan Orde baru dalam dunia politik Indonesia dan secara cepat mengubah kebijakan dalam negeri dan juga bapak Soeharto mengubah kebijakan luar negeri Indonesia yang telah di tempuh oleh bapak Soekarno d akhir masa jabatannya. Karena orde baru pada saat itu lebih mementingkan perbaiki dan melakukan perkembangan ekonomi sebagai landasan tujuan utama dari pemerintahan Orde baru. Pemerintahan Orde baru juga menjalankan kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi yang berasal dari didikan dunia Barat (Indonesia.com, 2011).

Setelah membekunya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China sejak 30 oktober 1967 Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Bapak Suharto pada kali itu mencoba untuk membangkitkan atau menhidupkan lagi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China yaitu pada saat Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China saat itu Qian Qichen, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo pada 24 Februari 1989 (Utami, 2015).

Pertemuan yang dilakukan oleh presiden Jendral Soekarno tidak berhenti disitu saja dan dilanjutkan pembahasan normalisasi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang pada saat itu adalah Ali alatas. Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan dengan Qian Qichen yang pada saat itu menjadi Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China pada 4 Oktober 1989 di Tokyo. Yang dimana hasilnya kedua menteri luar negeri tersebut telah menandatangani Komunike Bersama, yaitu "The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries" pada 3 Juli 1990 (Utami, 2015).

Setelah penandatanganan tersebut selesai dan perdana menetri Republik Rakyat China Li Peng melakukan kunjungan ke Indonesia serta menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bahwasannya hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat China telah pulih kembali pada 8 Agustus 1990 setelah pembekuan selama 23 tahun lamannya (Utami, 2015).

Keberhasilan hubungan diplomatik ini seperti didorong oleh faktor ekonomi perdagangan dan Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1988 tersurat bahwa dalam rangka mengembangkan ekspor non migas maka perlu dicarikan peluang pasar baru untuk menyerap ekspor komoditas non migas Indonesia.

Pada era presiden kedua Jendral Soeharto, penormalisasian tentang hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China pada awal tahun 1990-an yang amat bernilai

bagi Republik Rakyat China yang pada saat itu tengah dikecam oleh dunia Barat setelah peristiwa Tiananmen (Peristiwa pembantaian di lapangan Tiananmen).

Presiden Soeharto pun melakukan kunjungan balasan pada tanggal 14 sampai 18 November 1990 dan beliau juga menyaksikan penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja Sama Teknik. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN dan Tiongkok, hingga akhirnya pada 1996 Republik Rakyat China menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Bagi Indonesia, dalam sektor ekonomi, hubungan dengan Republik Rakyat China menjadi sangat penting, terutama setelah negara ini dihantam badai krisis finansial Asia pada 1997 (Utami, 2015).

Pada masa sebelum membaiknya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China yang sebelumnya membeku, menjadikan Soeharto semakin gencar dalam membangun hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa Barat agar mereka para bangsa-bangsa Barat ingin menanamkan investasi di Indonesia. Diterimanya kembali Indonesia di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tadinya Indonesia menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1965, membuat Republik Rakyat China ingin kembali mendekati Indonesia.

Namun Republik Rakyat China pada saat itu sedang menjalin kerjasama dengan 3 negara-negara yang ada di kawasan Asia tenggara dan Republik Rakyat China disarankan untuk tidak mencoba menormalisasikan hubungan Diplomatiknya kepada Republik Indonesia. Hingga pada akhirnya di tahun 1973, Jendral Soeharto menyatakan bahwa Indonesia akan menormalisasikan hubungannya dengan Republik Rakyat China dengan syarat Republik Rakyat China berhenti memberikan bantuan terhadap mantan pimpinan PKI (Alvianti, 2014).

Dalam membangun kembali hubungan Diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China, pemerintahan Jendral Soeharto melakukan mobilisasi terhadap NDC atau disebut dengan National Development Center. Melakukan mobilisasi terhadap NDC ini adalah berguna untuk mengumpulkan modal-modal dari warga Republik Rakyat China guna melakukan pembangunan Nasional.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia melakukan perbaikan hubungan Diplomatik dengan Republik Rakyat China dalam urusan perdagangan dan Republik Indonesia juga membangun hubungan Diplomatik dengan Republik Rakyat China di dalam urusan menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Republik Rakyat China.

Di dalam hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan China ini dikarenakan sistem Ali baba (sistem cukong) yang ada di Indonesia telah gagal, karena sistem Ali baba ini mengalami kegagalan karena adanya indikasi yang dimainkan oleh pemerintah dan aliran-aliran dana diduga mengalir kepada para Cukong yang mengakibatkan rakyat Indoonesia membenci pemerintah.

Apabila di lihat dari sisi lain para pembisnis dari Indonesia tetap memilih pembisnis yang berasal dari Republik Rakyat China sebagai partnernya dikarenakan para pengusaha-pengusaha dalam negeri beranggapan bahwa pembisnis yang berasal dari Republik Rakyat China lebih berpengalaman dalam persoalan-persoalan bisnis sehingga menurut pengusaha-pengusaha yang berasal dari Indonesia beranggapan lebih menguntungkan dibanding pebisnis dalam negeri (Alvianti, 2014).

Faktor domestik dan faktor internasional yang menjadikan peran dalam proses politik luar negeri Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China. Tingginya keinginan Indonesia untuk menjadikan negara yang dominan di wilayah regional membuat Indonesia dan beberapa negara lainnya membentuk ASEAN, selain itu

normalisasi hubungan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China berangsur-angsur membaik.

Namun sistem Ali Baba yang diduga menyimpan kecurangan atas permainan pemerintahan dengan para cukong akhirnya mengakibatkan adanya inflasi di dalam negeri. Modal China adalah satu-satunya yang tidak dianggap sebagai modal asing. Terjadi peningkatan masalah hutang dan memburuknya nilai tukar perdagangan, semata-mata hanya disebabkan oleh permainan ekonomi di dalam pemerintahan Soeharto (Alvianti, 2014).

Pada era presiden Habibie (1998-1999)

Presiden Republik Indonesia ketiga dijabat oleh bapak Bacharuddin Jusuf Habibie, yang juga dulu beliau merupakan mantan wakil presiden kedua yaitu Jendral Soeharto. Tak heran bagi kita masyarakat Indonesia yang hampir semua mengetahui sepeak terjal bapak Habibie dengan kejeniusannya dan prestasi-prestasi yang telah beliau raih di kaca International yang mengantar beliau menjadi orang nomor satu di dalam negeri ini. Pada era orde baru, bapak Habibie harus meningkatkan kerja kerasnya dalam menghadapi kondisi negara yang pada saat itu masih terjadi carut-marut dan juga bapak Habibie melakukan pemulihan terhadap berbagai bidang yang ada pada Republik Indonesia terkhususnya permasalahan dibidang perekonomian.

Dengan masa jabatan bapak Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia yang terbilang sangat singkat, permasalahan-permasalahan luar negeri terkhususnya hubungan Diplomatik dengan Republik Rakyat China tidak menyita perhatian dan penyelesaian yang dignifikan.

Pada masa kepemimpinan bapak Bacharuddin Jusuf Habibie yang dilakukan yang berkaitan dengan China hanya mengatasi persoalan minoritas yang dialami oleh masyarakat China yang ada di Indonesia atau masyarakat yang memiliki keturunan dari

China. Seperti, penghapusan kode inisial K-1 yang terdapat pada KTP (kartu tanda penduduk) dengan menggantikan sebutan “TIONGHOA” sebagai warga Indonesia yang memiliki keturunan China dan juga pada zaman bapak Bacharuddin Jusuf Habibie ini juga mengakui agama Konghuchu sebagai agama yang ada di Indonesia serta menjadikan bahasa Mandarin sebagai suatu mata pelajaran bahasa asing di Indonesia. Namun rencana tersebut tidak terbukti terlaksana dengan baik. Selain itu dikeluarkan pula Instruksi Presiden (Inpres) No 26/1998, yang berisi tentang dihapuskannya istilah pribumi dan nonpribumi (Rachmayanti, 2013).

Pada masa era Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan bapak Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden ketiga dan kemudian MPR (Majelis Pemusyawaratan Rakyat) mengadakan rapat atau berkumpul guna pembahasan untuk menggantikan posisi bapak Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden dan mengadakan pemilihan Presiden yang kemudian terpilih yaitu Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Dur sebagai Presiden keempat. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggung jawaban *Presiden B.J. Habibie*. Sebelum terpilih menjadi Presiden keempat, bapak Abdurrahman Wahid sebagai politikus yang mendirikan partai politik PKB dan mengikutsertakan partainya ke dalam pemilu legislatif hingga dirinya menjadi kandidat pada pemilihan presiden (Calsta, 2017).

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang berlangsung pada periode tahun 1999-2001 ini, memiliki agenda perpolitikan dalam rangka untuk pemulihan perekonomian Republik Indonesia dan perbaikan citra politik di mata dunia internasional yakni dengan cara melakukan kunjungan ke negara-negara di dunia

termasuk Republik Rakyat China. Kunjungan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid yaitu untuk menarik para investor agar bersedia menanam investasi mereka di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hubungan Diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China, Abdurrahman Wahid telah membuka peluang persahabatan antar kedua negara dimana pada masa sebelumnya hubungan Indonesia dengan China kurang bersahabat dan membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, Republik Rakyat China yang menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh bapak Presiden keempat Abdurrahman Wahid setelah pelantikan dirinya sebagai presiden yaitu pada tanggal 1-3 Desember 1999 (Sudarso, 2012).

Melalui kunjungan yang telah dilakukan oleh Abdurrahman Wahid di China membuat babak baru hubungan Diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China dan menjadi dasar sebagai pernyataan kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan.

Setelah hubungan Diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China mulai mengalami perbaikan dan tidak membeku pasca orde baru, China bersedia menyalurkan bantuan sebesar US\$5 miliar dan China juga memberikan fasilitas kredit sebesar US\$200 juta untuk pembelian bahan makanan. Selain itu juga disepakati kerja sama keuangan, teknologi, perikanan, promosi kunjungan wisata dan kerjasama dalam bentuk “Counter Trade” (bentuk timbal balik dari perdagangan internasional) di bidang energi melalui penukaran LNG Indonesia dengan produk China (Rachmayanti, 2013). Sedangkan yang menjadi urusan di dalam negeri sendiri yaitu bapak Abdurrahman Wahid yang melakukan terobosan tersendiri guna menghilangkan penindasan terhadap minoritas terkhususnya orang-orang Tionghoa (keturunan China). Salah satu bentuk dari tindakan bapak Abdurrahman Wahid adalah

mencabut instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 dan bapak Abdurrahman Wahid menggantikan dengan dikeluarkannya Peraturan baru dari Presiden yaitu Peraturan Presiden No. 6 tahun 2000 tentang hal beragama, kepercayaan dan adat istiadat Etnis Tionghoa (Ibad & Akhmad, 2012).

Dengan telah dikeluarkannya peraturan Presiden yang baru tersebut oleh bapak Abdurrahman Wahid menjadikan suatu pencerahan bagi orang-orang yang memiliki etnis Tionghoa di Indonesia untuk diberi Hak untuk menghidupkan budaya Tionghoa mereka yang akan semakin terbuka. Bapak Abdurrahman Wahid memiliki pandangan tersendiri sebagai Presiden pemimpin negara ini yaitu para etnis Tionghoa (China) memiliki potensi yang berarti dalam hal membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Akan tetapi apabila di lihat dari situasi dalam negeri yang masih cenderung memiliki sifat Rasis maka kecil kemungkinan etnis Tionghoa akan dengan mudah dan lancar untuk keikutsertaan mereka dalam membantu perekonomian Indonesia. Sehingga menurut bapak Abdurrahman Wahid, sistem pemerintahan yang *rasialis* harus dihilangkan agar para pemilik modal yang rata-rata adalah elite Tionghoa dapat secara aman berinvestasi kembali di Indonesia.

Pada masa era Megawati (2001-2004)

Megawati konsisten dengan pandangan politik-ideologisnya. Anak kandung dari salah satu Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Ir. Soekarno itu akan mewarisi pandangan ideologis bapaknya yang membangun poros 'Jakarta – Peking'. Pada masa presiden kelima Republik Indonesia yaitu ibu Megawati Soekarno Putri bahwa hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China terus mengalami peningkatan yang signifikan. Megawati pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke China yaitu lebih tepatnya di Beijing. Kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Megawati yaitu melakukan kesepakatan dengan pemerintah Republik Rakyat China dalam melakukan

peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik. Kesepakatan yang dicapai antara lain pembukaan konsulat jenderal baru di sejumlah kota, baik China maupun Indonesia, dan pembentukan forum energi antarkedua negara. Perdagangan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China terjadi peningkatan yaitu yang tadinya hanya 2 miliar sampai \$8 AS dan investasi China juga meningkat pada tahun 1999 yaitu \$282 AS naik pada tahun 2003 menjadi \$6,8 miliar AS (USU, 2011).

Selanjutnya, dalam wacana publik, ikon kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok terpelihara melalui "diplomasi dansa" Megawati. Di era kepemimpinan Megawati kedua sepakat membentuk forum energi yang merupakan payung investasi China di Indonesia di bidang energi.

Di era Megawati hanya melanjutkan sistem pemerintahan dari bapak Presiden keempat Republik Indonesia yaitu bapak Abdurrahman Wahid, dan semakin jauh penetrasi kalangan Cina 'perantauan' terhadap kekuasaan Mega. Intinya penguasaan atas ekonomi Indonesia semakin jauh, saat Mega berkuasa. Melalui lobi-lobi, Mega datang ke Peking (Beijing), dan menandatangani penjualan 'gas tangguh' dengan harga yang sangat murah. Sambil berdansa dengan Presiden China. Mega menjual asset negara yang paling penting dan sangat strategis, yaitu Indosat kepada Singapura, yang menjadi pusat China 'perantauan'. Ketika Mega menjadi presiden, yang pusat pengambilan keputusan politik bukan di Jakarta, tapi di Singapura (Voaislam, 2015).

Pada masa era Susilo Bambang Yudoyono (2005-2015)

Klimaks dari hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China yaitu pada pemerintahan Presiden keenam Republik Indonesia yaitu bapak Susilo Bambang Yudoyono. Perdagangan dengan China memang membuat Keprihatinan kepada Indonesia terlebih lagi negara Republik Rakyat China telah menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Dari pihak Republik Rakyat China telah mengeluarkan angka

statistik yang telah diterbitkan yang memperlihatkan angka Surplus bagi Republik Indonesia dan Indonesia sepertinya juga telah menerbitkan angka statistik seperti yang dilakukan oleh China, akan tetapi hasilnya berbeda. Para pengusaha kalangan kecil dan kalangan menengah memang begitu merasakan keluhan akan “ancaman” barang murah dari China. Pada tahun 2008 yaitu pada saat itu terjadi krisis keuangan Global dan yang ditakutkan kalau China akan mengalihkan produk eksportnya dan mengirim ke negara-negara tetangganya termasuk Indonesia (Wibowo & Hadi, 2009).

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono telah melakukan penertiban arus perdagangan Indonesia dengan China kepada Kementerian Perdagangan dan Instansi dan penertiban ini dilakukan karna adanya perbedaan data nilai perdagangan antara Indonesia dengan China. Presiden pun menunjuk Menteri Perdagangan yang pada saat itu dipimpin oleh Gita Wirjawan untuk mengusut permasalahan dan menindak siapa pun yang melanggar hukum. Indonesia mencatat nilai perdagangan kedua negara mencapai USD50 miliar, sedangkan China mencatat nilai sebesar USD60 miliar. Presiden keenam ini memiliki pandangan terhadap masalah tersebut yaitu bahwasannya barang yang Indonesia yang dikeluarkan dari Pintu yang tidak resmi melalui negara tetanga dan itu adalah penghianatan. Pandangan tersebut tercetus ketika beliau melakukan kunjungan kenegaraan di Beijing pada 24 Maret 2012 (Sindonews, 2012).

Pada masa presiden SBY hubungan antara Indonesia dengan China mengalami peningkatan atas nilai perdagangan mencapai USD80 miliar yaitu pada tahun 2015 dan juga hubungan Indonesia dengan China di masa Susilo Bambang Yudoyono juga memperkuat kerja sama dalam bidang Industri, Sumber daya manusia dan energi dan juga memperkuat kerja sama pada berbagai bidang dengan nilai lebih dari USD17,4 miliar. Melalui Presiden China Hu Jiantao bahwa Republik Rakyat China akan

menegaskan untuk mempromosikan kemitraan strategis Republik Rakyat China dengan Indonesia di beberapa area kerja sama perdagangan, pertahanan, maritim dan ekonomi serta kerja sama dalam urusan regional dan internasional (Sindonews, 2012).

Era Baru adalah istilah dari kerjasama Bilateral Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China. Pemerintah Indonesia mengatakan kerja sama ekonomi dengan Cina yang ditandatangani oleh petinggi kedua negara di Jakarta hari Rabu 02 Oktober 2013 merupakan penanda dimulainya sebuah era baru. Pada sebelumnya kerja sama Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China yang lebih mendominasi perdagangan, pada masa bapak SBY mulai melakukan pergeseran dalam kerja sama yaitu mengarah ke industrialisasi dan pembangunan yang bersifat non perdagangan. China juga berupaya mendorong kerjasama pragmatis yang mendorong kesejahteraan bersama. Kedua negara selama ini punya kepentingan luas mulai investasi, infrastruktur dan energi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai investasi China ke Indonesia pada Kuartal I 2013 nilainya mencapai US\$ 60,2 juta dari 99 proyek yang dijalankan. Sedangkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Cina pada Semester I 2013 mencapai US\$ 10,09 miliar (Nugroho, 2013).

Pada masa era Joko Widodo (2015-2019)

Presiden Republik Indonesia yang ke tujuh yaitu Bapak Ir. Joko Widodo yang telah memenangkan Pemilu pada 9 Juli 2014 yang berarti 3 tahun belakang. Bapak Jokowi yang seperti sapaan akrab kepada beliau melanjutkan kinerja yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke enam yaitu Susilo Bambang Yudoyono dan menambahkan beberapa pekerjaan yang sesuai Visi Misi selama kampanye yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Walau pemerintahannya memimpin Negeri ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun bapak Jokowi sudah menampakkan sistem kerja

pemerintahannya dan begitu pula dengan hubungan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China yang diperkuat oleh bapak Jokowi.

Kunjungan kenegaraan yang pertama kali dilakukan oleh bapak Jokowi yaitu langsung menuju ke negara Republik Rakyat China. Di dalam kunjungannya tersebut Jokowi melakukan penyampaian visi misi pada waktu kampanye yang bersangkutan dengan hubungan Indonesia China serta kepentingan Nasional. Dalam kunjungan pertama tersebut juga telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi meliputi Tiga hal yaitu tegas dan bermartabat, pro rakyat dan membumi, tidak berjarak dengan kepentingan rakyat.

1. Sektor kerja sama Indonesia dengan China

Di awal pemerintahannya Jokowi mengenai Hubungan Indonesia dengan China yaitu Jokowi melakukan 3 sektor dalam kerjasama:

1. *Sektor Pertama.* Karena pada waktu pencalonan Jokowi memiliki Visi yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebangun dengan rencana pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, membangun Jalan Sutra Maritim Baru (New Maritime Silk Road). Perencanaan ini menurut para pejabat serta para pengamat politik China yaitu rencana ini memiliki tujuan untuk memperkuat konektivitas maritim serta perencanaan ini mampu meningkatkan kapasitas negara Asia Tenggara dalam memaksimalkan keamanan dan pengelola sumber daya maritim. Perencanaan tersebut mampu memiliki potensi besar untuk disinergikan dengan usaha Indonesia dalam mencapai suatu kedaulatan Maritim dan kerjasama maritim tersebut membuat Hubungan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China tetap bergerak maju dan akan saling menguntungkan (Kompas.com, 2014).

2. *Sektor kedua* Indonesia melakukan kerjasama dengan China dalam mengelola Stabilitas kawasan karena terkait akan peristiwa sengketa teritorial yang ada di Laut China Selatan yang belum menemukan pencapaian yang signifikan setelah penandatanganan Deklarasi tata Prilaku pada tahun 2002. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ddidalam proses sengketa yang telah berlangsung dalam usaha mengelola sengketa tersebut Indonesia turut berperan aktif dan mengambil inisiatif dengan maksud berkontribusi secara positif dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan. Konflik ini menunjukkan bahwa dinamika penyelesaian damai sengketa di Laut China Selatan harus melibatkan Indonesia karena dalam hal ini peran serta sikap kooperatif Indonesia akan sangat bermakna bagi Republik Rakyat China yang dengan secara terbuka menyatakan komitmen menyelesaikan dialog damai (Kompas.com, 2014).

3. *Sektor ketiga* pada sektor ini Indonesia di bawah kepemimpinan bapak Jokowi melakukan kerja sama dalam peningkatan hubungan antar warga. sekarang hubungan internasional telah memasuki era yang dimana di dalamnya ada interaksi antarbangsa yang tidak selalu didominasi oleh interaksi-interaksi pejabat resmi yang cenderung elitis dan dengan hal ini Presiden Jokowi memiliki pemikiran akan konsep diplomasi yang membumi. Di dalam hal ini seperti mengisyaratkan hubungan antar warga yang akan sangat menentukan dinamika Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China, maksudnya bukan dalam artian yang sempit melainkan yang luas yaitu mencakup beragam kalangan termasuk akademisi, seniman, budayawan serta kelompok-kelompok agama. Kerja sama pada sektor yang ketiga ini juga dapat mendorong kedua warga negara untuk saling memahami karena lebih dari 30 tahun pada masa pembekuan hubungan diplomatik Indonesia dengan China warga kedua negara belajar bahwa saling mencurigai dan melihat satu sama lain sebagai anacaman. Akibat dari pola pikir warga negara seperti itu maka perlu peningkatan interaksi dan pertukaran antar warga demi

keberlangsungan hubungan kooperatif Indonesia dengan China yang saling menguntungkan tetap terjaga (Kompas.com, 2014).

Indonesia meningkatkan hubungan kerjasama dengan Republik Rakyat China dalam bidang ekonomi

Pada Jumat, 2 September 2016 Presiden ke tujuh Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke China dalam kesepakatan untuk peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi, pertemuan tersebut hanya berdurasi sekitar 30 menit. Kesepakatan dalam kemitraan bidang ekonomi ini ada tiga hal yang disepakati oleh kedua negara:

Pertama dalam upaya peningkatan perdagangan terutama bagaimana cara mempersempit Gap Defisit perdagangan Indonesia dengan China. Karena ekspor buah tropis Indonesia ke China itu merupakan upaya pemerintah dari dulu untuk dapat memasuki pasar China dan banyak standar serta aturan yang harus dipenuhi. Dalam kesepakatan tersebut China akan mendorong impor Indonesia untuk buah-buah tropis yang akan dipermudah dan dengan jalan seperti ini defisit perdagangan akan dapat dipersempit (Asmara, 2016).

Kedua kesepakatan yang kedua yaitu mengenai Investasi karena kedua pemimpin negara ini Bapak Jokowi serta Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping memiliki pandangan yang sama dalam persoalan peningkatan investasi kedua negara terutama dalam bidang manufaktur serta di dalam bidang infrastruktur (Asmara, 2016).

Ketiga kesepakatan yang didapat yang ketiga yaitu mengenai Pariwisata dan China akan lebih mendorong masyarakat China untuk lebih banyak berkunjung ke Indonesia. Serta Indonesia dengan Republik Rakyat China sepakat akan memperpanjang kerja sama *Bilateral Currency Swap Agreement* (kerja sama pertukaran mata uang) selama 3 tahun ke depan. Sebenarnya kerja sama tersebut dimulai sejak

tahun 2013 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan kesepakatan tersebut berakhir pada tahun 2016 yang memiliki nilai USD100 miliar, karena Indonesia melakukan penegosiasian ulang agar kerja sama kedua negara tetap dilanjutkan pada tahun 2019 dengan nilai sebesar USD130 miliar (Asmara, 2016).

Dalam pertemuan kedua pemimpin negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China yang terjadi di kota Hangzhou, China tersebut bahwa Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping mengharapkan hubungan bilateral dengan Republik Indonesia yang telah terjalin dengan baik agar semakin erat dan luas pada masa akan mendatang. Serta menganggap Republik Indonesia adalah negara tetangga Republik Rakyat China yang baik dan sekaligus mitra kerja yang baik dalam membangun kepercayaan serta dalam memperkuat hubungan sebagai mitra strategis komprehensif (News A. , 2016).

Dalam pertemuan tersebut Presiden Republik Rakyat China juga menyatakan akan memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam memadukan visi pada jalur sutra maritime abad 21 dan poros maritim serta China akan memperkuat hubungan antara masyarakat kedua negara melalui pertukaran budaya, pendidikan, media serta kesehatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendukung kepada China yang untuk kali pertama sebagai tuan rumah dalam KTT G20 (News A. , 2016).